

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun Anggaran 2009-2013)

Laili Khuriyah
Sri Mangesti Rahayu
Muhammad Saifi
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email :lellyciouss@gmail.com

ABSTRACT

Regional autonomy brings a number of changes to an area, especially in finance. An area is required to be more creative in searching sources of income to defray the area outcomes in executing government and development. One object which can be used is through restaurant tax. Revenue obtained from restaurant tax in the year 2009-2013 were increasing, and it could fulfill the required target. The contribution in the year 2009-2012 increased, but the contribution to own-source revenue decreased 3,82% in the year 2013. Revenue of restaurant tax is quite high, so that it needs an effective system to manage it well. This study is aimed at attaining an overview of restaurant tax collection system. Moreover, this research is also intended to get the information about the effectiveness of restaurant tax collection in Batu Revenue Office. This study is a descriptive-qualitative research. The results of the study show that there are several unused and incomplete forms. In fact, the forms should be used well. The researcher also found double function between registration section, data collection section, accountancy, and report. The effectiveness of tax collection based on time is considered effective since it is not time-consuming for the employees. The service time used by the employees is even less than what is required by Standard Operating Procedure (SOP).

Keywords : restaurant tax, effectiveness

ABSTRAK

Otonomi daerah membawa banyak perubahan bagi daerah khususnya di bidang keuangan. Daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu objek yang dapat digali adalah melalui pajak restoran. Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak restoran dari tahun 2009-2013 selalu mengalami peningkatan dan selalu dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusinya dari tahun 2009-2012 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2013 kontribusi terhadap PAD turun menjadi 3,82%. Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak restoran jumlahnya cukup besar sehingga diperlukan sistem yang efektif untuk mengelolanya. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran sistem pemungutan pajak restoran, dan mengetahui efektivitas sistem pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat beberapa formulir yang seharusnya digunakan namun tidak digunakan, serta formulir yang kurang sempurna. Ditemukan pula perangkapan fungsi antara seksi pendaftaran dan pendataan serta pembukuan dan pelaporan. Efektivitas sistem pemungutan pajak restoran berdasarkan waktu sudah cukup efektif karena waktu yang digunakan pegawai sudah sesuai bahkan kurang dari waktu pelayanan yang ditentukan menurut SOP.

Kata Kunci : pajak restoran, efektivitas

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Kota Batu, berdampak juga dengan semakin bertumbuhnya usaha restoran di Kota Batu. Pertumbuhan usaha restoran yang pesat dimanfaatkan sebagai suatu sumber penerimaan yang potensial bagi Pemerintah Daerah Kota Batu.

Berdasarkan tabel 1 mengenai penerimaan pajak restoran kota Batu, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak restoran sangat fluktuatif. Tahun anggaran 2009 hingga 2011 penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun anggaran 2012 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan menjadi sebesar 123,34% dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 126,68%.

Sedangkan Pada tabel 2 dapat dilihat pada tahun anggaran 2009-2012 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selalu mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun anggaran 2013 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi sebesar 3,82%. Penurunan kontribusi yang terjadi pada pajak restoran terjadi karena para pengusaha yang tidak setuju dengan sistem omset yang diterapkan oleh pemerintah Kota Batu sebagai dasar pemungutan pajak restoran karena dinilai terlalu tinggi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pengusaha.

Tabel 1 : Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Batu

Th.	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2009	750.000.000	392.560.215	52,34
2010	1.200.000.000	535.866.990	44,66
2011	745.000.000	1.268.660.956	170,29
2012	1.376.000.000	1.697.168.121	123,34
2013	1.800.000.000	2.280.251.940	126,68

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Batu Tahun 2009-2013 (data diolah)

Tabel 2 : Laporan Kontribusi Pajak Restoran Kota Batu

Th.	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2009	392.560.215	17.386.741.568,44	2,26
2010	535.866.990	17.735.602.953,95	3,02
2011	1.268.660.956	30.257.308.053,14	4,19
2012	1.697.168.121	38.794.059.670,38	4,37

2013	2.280.251.940	59.670.241.826,89	3,82
------	---------------	-------------------	------

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Batu Tahun 2009-2013 (data diolah)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sistem pemungutan pajak restoran, dan mengetahui efektivitas sistem pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Batu. Sistem pemungutan yang efektif diperlukan oleh pemerintah Kota Batu dalam penerimaan pajak restoran. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013)”.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Dalam mengetahui efektivitas sistem pemungutan tersebut, diperlukan referensi untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur didalamnya. Karena hal tersebut, peneliti mengutip beberapa pendapat mengenai efektivitas.

Mardiasmo (2004:134) menjelaskan, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijaksanaan (Mahsun (2006:182)).

Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan (Siagian(183:151)). Ukuran yang dapat digunakan digunakan untuk memperkirakan efektivitas menurut siagian (1983:153) adalah : ukuran waktu, yaitu berapa lama seseorang yang membutuhkan jasa tertentu untuk memperolehnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu dan penyelesaiannya tepat waktu.

Sistem

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi (2008 : 2))

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. (Undang-Undang No.28 Tahun 2009). Pajak restoran tergolong dalam jenis pajak kabupaten/kota. Yang dimaksud Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan atau tempat lain. Sedangkan subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dan yang dimaksud Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Tarif pemungutan pajak restoran telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yaitu sebesar 10%. Sistem pemungutan pajak restoran ada dua, yaitu: *self assessment system* dan *Official Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan *official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:7).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah antara lain: pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus; lain-lain pendapatan daerah yang sah (Undang-undang No.32 tahun 2004).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem pemungutan pajak restoran serta efektivitas sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Batu. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran yang meliputi :
 - a. Sistem dan prosedur pendaftaran dan pendataan pajak restoran.
 - b. Sistem dan prosedur penyetoran pajak restoran.
 - c. Sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak restoran.
 - d. Sistem dan prosedur penagihan pajak restoran.
2. Efektivitas sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Batu.

Lokasi penelitian ini pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang berada di Jalan Diponegoro no. 74 Batu (ruko Batu Galeria). Lokasi ini dipilih karena Kota Batu merupakan daerah pariwisata sehingga memiliki potensi pendapatan dari sektor pajak daerah yang cukup tinggi, khususnya Pajak Restoran karena Restoran merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata di Kota Batu, serta tersedianya data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari opini pribadi pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu mengenai sistem pemungutan pajak restoran. Data sekunder berupa dokumen tentang sistem pemungutan pajak restoran dan catatan yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dengan instrumen penelitian panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis gambaran sistem pemungutan pajak serta mengetahui efektivitas sistem pemungutan pajak restoran berdasarkan waktu dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP) dengan kenyataan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Batu

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 mengenai pajak restoran, digunakan sebagai dasar hukum pajak restoran Kota Batu. Perda tersebut menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran yang ditetapkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Sistem Pemungutan Pajak Restoran

a. Deskripsi Kegiatan Pokok

Sistem pemungutan pajak restoran adalah salah satu sistem yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu untuk melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah. Kegiatan yang terkandung dalam sistem ini dimulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah, penyetoran pajak daerah, pembukuan dan pelaporan pajak daerah hingga penagihan pajak daerah.

b. Fungsi Terkait

Fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Batu adalah:

- 1) Fungsi pendaftaran dan pendataan, melakukan pendaftaran pada wajib pajak daerah serta mendata wajib pajak dengan sebenar-benarnya.
- 2) Fungsi pelayanan yang, menerima pembayaran dari wajib pajak kemudian menyetorkannya ke bank.
- 3) Fungsi pembukuan dan pelaporan, membukukan dan melaporkan pendapatan yang diterima Dinas Pendapatan Kota Batu.
- 4) Fungsi penagihan, menagih pajak kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo.

c. Informasi yang Dibutuhkan

Informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu dari sistem pemungutan pajak restoran ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Laporan tersebut tidak hanya dibutuhkan oleh pihak internal Dinas Pendapatan Kota Batu tetapi juga dibutuhkan oleh pihak luar yaitu BPKAD, Pemerintah Kota Batu dan masyarakat yang membutuhkan informasi.

d. Dokumen dan Catatan Akuntansi yang Digunakan

- 1) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) memuat informasi wajib pajak daerah tentang identitas pribadi serta usaha yang dimiliki.
 - 2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) memuat informasi jumlah pendapatan atau omset wajib pajak serta jumlah pajak yang dikenakan atas usaha wajib pajak.
 - 3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) memuat jumlah setoran yang dibayar wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Kota Batu.
 - 4) Surat Tanda Setoran (STS) memuat jumlah setoran yang disetorkan Dinas Pendapatan Kota Batu kepada Bank Pembangunan Daerah.
 - 5) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) memuat peringatan kepada wajib pajak yang belum melunasi pajaknya hingga tanggal jatuh tempo.
 - 6) Surat Teguran memuat jumlah tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak.
 - 7) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) digunakan mencatat penerimaan yang diterima oleh kasir/Bendara Khusus Penerima dalam 1 hari.
 - 8) Buku Kas Umum (BKU) digunakan mencatat jumlah setoran yang diterima berdasarkan STS.
- #### e. Pengendalian Intern
- 1) Organisasi
Pengendalian internal pada Dinas Pendapatan Kota Batu dilaksanakan dengan memisahkan fungsi pokok: operasi, penyimpanan dan akuntansi. Dalam sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Batu fungsi operasi dilakukan oleh bidang pendataan dan pelayanan, fungsi penyimpanan dilakukan oleh seksi pengelolaan benda berharga dan fungsi akuntansi dilakukan oleh bidang pembukuan dan pelaporan.
 - 2) Sistem Otorisasi
Dalam sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Batu setiap transaksi di otorisasi pejabat yang berwenang, hal ini dapat dilihat dari validasi setiap formulirnya yang hanya bisa diisi atau di tanda tangani oleh petugas yang memiliki wewenang atas transaksi tersebut.
 - 3) Praktek yang Sehat
Praktek-praktek sehat yang telah diterapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu antara lain ::
 - a) Menggunakan formulir yang sebagian besar telah memiliki nomor urut tercetak yang

pemakaiannya dapat dipertanggung jawabkan oleh petugas/pejabat yang memiliki otorisasi atas formulir tersebut.

- b) Pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh BPK.
- c) Setiap transaksi tidak dilaksanakan oleh satu unit saja.
- d) Rotasi jabatan dilakukan 5 tahun sekali bagi kepala bidang atau kepala seksi.
- 4) Karyawan yang Mutunya Sesuai Tanggung jawabnya

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S2	5	7,04%
S1	29	40,85%
D1	1	1,41%
D3	4	5,63%
SMA/SMK	32	45,07%
Total	71	100%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, data diolah.

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui Menurut prosentasenya, mayoritas pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu adalah SMA/SMK yaitu sebanyak 45,07%. Untuk jabatan-jabatan yang strategis seperti kepala dinas, kepala bagian dan kepala seksi ditempati oleh pegawai yang menempuh jenjang pendidikan S2 dan S1, hanya ada 1 kepala seksi yang memiliki pendidikan terakhir SMA.

f. Prosedur-Prosedur dalam Sistem Pemungutan Pajak Restoran

1) Prosedur pendaftaran dan pendataan

Wajib pajak menuju ke bagian pendataan dan pelayanan tepatnya pada seksi pendaftaran dan pendataan dengan membawa fotokopi KTP. Petugas seksi pendaftaran dan pendataan akan memberikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) kepada wajib pajak untuk diisi secara lengkap dan benar. Seksi pendaftaran dan pendataan memeriksa kelengkapan FPWP, apabila FPWP sudah lengkap maka Formulir Pendaftaran Wajib Pajak lembar 1 akan didistribusikan pada Wajib Pajak, dan lembar 2 didistribusikan pada seksi pendaftaran dan pendataan. Berdasarkan FPWP tersebut seksi pendaftaran dan pendataan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Kemudian petugas pendaftaran dan pendataan akan memberikan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak restoran 5 rangkap. NPWPD dan SPTPD 5 rangkap diberikan kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar. SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak dikembalikan kepada seksi Pendaftaran dan pendataan.

2) Prosedur Penyetoran

Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan membawa SPTPD, bon penjualan/*bill* dan laporan penerimaan bulanan ke bagian kasir. Kasir mengecek dokumen yang dibawa oleh wajib pajak, dan menerima pembayaran. SPTPD sebanyak 5 rangkap didistribusikan kepada wajib pajak, seksi pembukuan, bagian pendataan, bagian penetapan dan bagian penagihan.

Bagian kasir/BKP menerima setoran uang dari Wajib Pajak dan menerbitkan serta memvalidasi SSPD sebanyak 5 rangkap, yaitu lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk kasir penerima, lembar ketiga untuk bidang pembukuan, lembar keempat untuk bidang penagihan, dan lembar kelima untuk kasda. Berdasarkan SSPD, bendahara penerima mencatat dan menjumlahkan pendapatan pajak yang diterima selama 1 hari ke dalam BPPS (Buku Pembantu Penerimaan Sejenis). Berdasarkan BPPS tersebut, petugas kasir / bendahara khusus penerima mencatat dan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) sebanyak 5 rangkap, dan didistribusikan kepada : pada bagian keuangan sebanyak 2 lembar, bank sebanyak 1 lembar, bendahara khusus penerima sebanyak 1 lembar, dan bagian pembukuan sebanyak 1 lembar. Penyetoran dilakukan oleh bendahara penerima / kasir pada hari itu juga pukul 15.00.

3) Prosedur pembukuan dan pelaporan

Bagian Pembukuan dan pelaporan Menerima STS lembar ke 5 dari kasir / bendahara penerima, kemudian dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) sebanyak 2 rangkap, untuk bagian keuangan Dispenda dan untuk bagian keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang hasilnya dijadikan dasar untuk membuat Laporan Penerimaan Pajak Restoran, kemudian setiap bulannya membuat Laporan Realisasi Penerimaan PAD bulanan. Kemudian Bagian Keuangan membuat Laporan Keuangan Dinas untuk

diserahkan kepada Kadispenda berdasarkan BPPS dan BKU.

4) Prosedur penagihan

Berdasarkan SPTPD yang diterima oleh bagian penagihan, jika terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak lebih dari tanggal jatuh tempo (setelah tanggal 10 setiap bulannya) maka bagian penagihan membuat Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebanyak 2 rangkap dengan rincian lembar pertama untuk wajib pajak dan lembar kedua untuk diarsipkan oleh bagian penagihan. Setelah diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah sebanyak 3 kali dan wajib pajak belum melakukan pembayaran akan diterbitkan Surat Teguran, dimana jatuh tempo pelunasan adalah 21 hari setelah tanggal Surat teguran. Apabila setelah jatuh tempo lewat dan pajak belum dilunasi maka akan diterbitkan Surat Paksa Jenis Pajak.

Pembahasan

1. Analisis Dokumen dan Catatan Akuntansi yang Dibutuhkan

a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP)

Formulir ini telah mengandung nama dan alamat instansi, sehingga sudah memenuhi syarat formulir yang baik, hanya saja nomor urutnya masih diisi manual, belum terdapat nomor urut tercetak.

b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

formulir ini sebenarnya sudah baik karena telah memiliki nomor urut tercetak, nama dan alamat instansi telah tertera tetapi masih memiliki kekurangan, yaitu: belum dicantumkan pihak mana saja yang akan menerima tembusan dari formulir, serta kurang ringkas karena memuat rekaman data yang tidak perlu.

c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Formulir ini masih memiliki kekurangan yaitu dalam formulir SSPD ini sudah terdapat cap atau stempel Dinas Pendapatan sehingga dikhawatirkan formulir tersebut disalahgunakan untuk praktek-praktek yang kurang sehat.

d. Surat Tanda Setoran (STS)

Formulir ini sudah baik karena telah terdapat nama dan alamat instansi, serta nomor urut. Informasi yang diberikan dari formulir ini juga sudah sangat jelas karena telah diuraikan secara rinci, serta diotorisasi oleh beberapa pihak yang berwenang atas transaksi penyetoran.

e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Formulir ini sudah baik karena telah terdapat nama dan alamat instansi, informasi yang dibutuhkan dari formulir ini juga sudah jelas serta telah di otorisasi oleh pejabat yang berwenang.

f. Surat Teguran

Formulir ini sudah baik karena selain telah memuat nama dan alamat instansi juga sudah terdapat nomor surat. Informasi yang disampaikan dari formulir ini juga sudah cukup jelas, dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

e. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS)

Catatan akuntansi ini telah memenuhi pencatatan akuntansi yang dibutuhkan dalam transaksi penerimaan, dan dapat memudahkan pembuatan laporan keuangan.

f. Buku Kas Umum (BKU)

Buku Kas Umum yang digunakan Dinas Pendapatan kota Batu sudah baik karena sudah dapat memenuhi pencatatan akuntansi yang dibutuhkan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

2. Analisis Pengendalian Intern

a. Organisasi

Dinas Pendapatan Kota Batu terlalu banyak merangkap beberapa fungsi menjadi satu seksi, sehingga kinerjanya kurang maksimal. Dalam kaitannya dengan sistem pemungutan pajak restoran, seksi pendaftaran dan seksi pendataan yang dijadikan menjadi satu seksi. Kemudian seksi pembukuan juga seharusnya perlu dipisah dengan seksi pelaporan sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

b. Sistem Otorisasi

Sistem otorisasi yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota Batu dalam kaitannya dengan sistem pemungutan pajak restoran sudah baik, karena setiap transaksi di otorisasi pejabat yang berwenang.

c. Praktek yang Sehat

- 1) Hampir semua formulir yang digunakan telah memiliki nomor urut tercetak, kecuali formulir pendaftaran wajib pajak.
- 2) Hasil pemeriksaan dapat dipercaya karena pemeriksaan dilakukan oleh pihak eksternal yaitu BPK.
- 3) Rotasi jabatan yang dilakukan rutin dalam 5 tahun sekali bagi kepala bidang atau kepala seksi.

- 4) Setiap transaksi tidak dilaksanakan oleh satu orang atau satu unit saja dari awal hingga akhir.
- 5) Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya

Pendidikan informal seperti diklat yang berkaitan dengan pajak restoran sangat dibutuhkan para pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu, karena pendidikan formal tidak dapat menjamin pegawai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga pegawai tidak hanya mampu untuk selalu meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran tetapi juga mampu untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Namun belum ada pegawai di Dinas Pendapatan Kota Batu yang pernah mengikuti diklat khusus tentang pajak restoran. Pegawai hanya pernah mengikuti diklat jabatan seperti diklat PIM dan diklat kepegawaian.

3. Analisis Prosedur-Prosedur dalam sistem Pemungutan Pajak Restoran

a. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan

Pada prosedur pendaftaran dan pendataan masih terdapat kekurangan, yaitu:

- 1) Terjadinya perangkapan antara seksi pendaftaran dan pendataan. Sebaiknya seksi pendaftaran dan pendataan dipisah agar tugas yang dikerjakan lebih maksimal hasilnya.
- 2) Belum menggunakan Kartu Data Pajak Restoran sehingga pembayaran tidak dapat direkam dengan baik.

b. Prosedur Penyetoran

Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam prosedur penyetoran, antara lain:

- 1) Sebaiknya saat wajib pajak melakukan pembayaran cukup membawa SPTPD serta bon penjualan/*bill* saja, karena bon penjualan/*bill* tersebut telah diberi nomor cetak dan diporvorasi oleh Dinas Pendapatan sehingga tekah terjamin keakuratannya.
- 2) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) dibuat 2 rangkap, yaitu untuk arsip bagian kasir dan untuk diserahkan pada bagian keuangan.

c. Prosedur Pembukuan dan Pelaporan

Sebaiknya seksi pembukuan dan pelaporan dipisah agar dapat menjalankan tugas masing-masing lebih maksimal.

d. Prosedur Penagihan

Dalam menghitung jumlah tunggakan wajib pajak tidak hanya berdasarkan SPTPD saja tetapi juga berdasarkan Kartu Data Pajak Reklame yang diterima dari seksi pendataan.

4. Efektivitas Waktu Pemungutan Pajak Restoran

Melalui pelayanan permohonan nomor pokok wajib pajak dan pelayanan pembayaran pajak daerah dapat dilihat tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Batu. Pelayanan tersebut telah diatur dalam konsep Standar Operasional Prosedur yang sedang dirancang oleh Dinas Pendapatan Kota Batu.

Tabel 4 Perbandingan Waktu Pelayanan Antara SOP dengan Petugas Lapangan

No	Jenis pelayanan	Waktu menurut SOP	Waktu di lapangan	Ket.
1.	Pelayanan permohonan NPWPD	1 hari	±1jam	efektif
2.	Pelayanan pembayaran	10 menit	±7menit	efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu, data diolah

Pelayanan pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Batu dapat dikatakan telah efektif apabila mengacu pada tabel 4. Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh petugas di lapangan telah memenuhi bahkan lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan dalam SOP.

Efektivitas waktu yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan Kota Batu dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah Kota Batu, karena dengan pelayanan yang cepat (sesuai dengan waktu SOP) maka akan mendorong Wajib Pajak untuk rajin membayarkan pajak yang menjadi kewajibannya. Apabila Wajib Pajak rajin membayar pajak maka pendapatan asli daerah Kota Batu akan meningkat.

5. Sanksi dalam Pemungutan Pajak Restoran

Pengenaan sanksi pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang pajak restoran.

- a. Apabila SPTPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

- b. Apabila STPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan masa tenggang 7 (tujuh) hari dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhitungnya pajak.
- c. Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung oleh pejabat yang berwenang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Dalam pengendalian intern khususnya pada bagian organisasi, pada Dinas Pendapatan Kota Batu masih terdapat perangkapan fungsi. Dalam kaitannya dengan sistem pemungutan pajak restoran adalah pada seksi pendaftaran dan pendataan serta pada seksi pembukuan dan pelaporan. Dengan perangkapan fungsi yang terjadi di khawatirkan tugas yang di emban oleh seksi-seksi tersebut tidap dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Pengendalian intern pada Dinas pendapatan Kota Batu dapat dikatakan cukup baik, karena telah dapat melaksanakan sistem otorisasi dengan baik, selalu mendapat pemeriksaan mendadak dari BPK, dan rotasi jabatan yang selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali.
3. Dalam sistem pemungutan pajak restoran ini masih terdapat prosedur-prosedur yang memungkinkan terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat karena terdapat beberapa fungsi yang dirangkap yaitu antara seksi pendaftaran dan pendataan serta antara seksi pembukuan dan pelaporan.
4. Beberapa formulir yang digunakan di dalam sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Batu masih belum memenuhi kriteria penyusunan formulir yang baik seperti

formulir pendaftaran yang belum memiliki nomor urut tercetak, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang belum menyertakan keterangan pihak mana saja yang akan mendapat salinan dari formulir tersebut dan memuat kolom yang berisi rekaman data yang tidak perlu pada bagian C mengenai data wajib pajak *Official System*, dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tdi setiap formulirnya telah terdapat cap atau stempel Dinas Pendapatan Kota Batu.

5. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki kualitas yang kurang memadai jika dibandingkan dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, karena belum adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti pegawai yang berkaitan dengan pajak restoran, para pegawai hanya mengikuti diklatjabatan saja.
6. Efektivitas waktu dalam pelayanan pembayaran pajak restoran sudah efektif, karena waktu yang dibutuhkan oleh petugas dalam melayani wajib pajak telah sesuai bahkan kurang dari SOP yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu.

Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas, maka saran untuk dapat meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan pemisahan antara beberapa seksi yang dirangkap, yaitu antara seksi pendaftaran dengan seksi pendataan dan antara seksi pembukuan dengan seksi pelaporan. Dengan pemisahan fungsi ini diharapkan kinerja masing-masing seksi akan lebih maksimal.
2. Sebaiknya dilakukan penyempurnaan pada formulir yang kurang memenuhi kriteria formulir yang baik, seperti pada formulir pendaftaran dengan memberi nomor urut tercetak, pada formulir SPTPS dengan memberikan keterangan pihak yang akan menerima salinan serta menghapus kolom yang berisi rekaman data yang tidak perlu, dan pada formulir SSPD dengan tidak memberikan stempel atau cap pada formulir yang masih kosong.
3. Peningkatan terhadap kualitas sumber daya yang dimiliki Dinas Pendapatan Kota Batu dengan memberikan pelatihan atau diklat mengenai pajak restoran pada para pegawai.
4. Mengoptimalkan Pemberian sanksi dan pengenaan denda dengan mengintensifkan

kegiatan pengawasan lapangan dan memberikan himbauan kepada para wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Siagian, P. Sondang. 1983. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku administrasi*. Jakarta : NV Sapdodadi.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restor

